

MODUL
KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA PADA AWAL KEMERDEKAAN
SAMPAI ORDE LAMA

MATERI : KEHIDUPAN POLITIK MASA AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI
ORDE LAMA



Fredy Hermanto, S. Pd., M.Pd.

PPG DALAM JABATAN
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2018

A. Pendahuluan

Kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan hasil perjuangan rakyat Indonesia selama berpuluh-puluh, bahkan beratus ratus tahun lamanya. Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia berhasil meraih kemerdekaan. Dengan kemerdekaan itu bangsa Indonesia bebas dari belenggu penjajahan yang sangat menyengsarakan rakyat. Setelah memproklamasikan kemerdekaan, ternyata masih banyak ancaman dan hambatan yang harus dihadapi bangsa Indonesia. Oleh sebab itu segenap rakyat beserta pemimpin bangsa terus berupaya menghadapi ancaman dan hambatan yang menghadang tersebut. Ancaman dan hambatan tersebut muncul dari dalam dan juga dari luar negeri. Tidak hanya perjuangan secara fisik dengan angkat senjata yang dilakukan namun juga dengan diplomasi pada berbagai perundingan yang dilakukan dengan Belanda pada khususnya. Modul berjudul kehidupan sosial, ekonomi dan politik masa orde lama ini membahas mengenai kehidupan masyarakat Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dari segi sosial, ekonomi, maupun politik hingga Soekarno lengser dari jabatan Presiden Indonesia di tahun 1967.

Modul ini terdiri dari beberapa bagian diantaranya: Pendahuluan; Capaian pembelajaran; Materi; Rangkuman; Tugas, Tes dan Daftar Pustaka. Proses pembelajaran untuk materi kehidupan sosial, ekonomi, politik masa orde lama yang sedang anda ikuti saat ini, dapat berjalan dengan lebih lancar bila Anda mengikuti langkah-langkah belajar sebagai berikut ini:

1. Pahami dulu mengenai berbagai kegiatan penting dalam modul mulai tahap awal sampai akhir.
2. Lakukan kajian terhadap materi kehidupan masyarakat Indonesia pada masa orde lama terlebih dahulu agar anda mendapat mendapat mengkonstruksi pengetahuan lebih detail.
3. Pelajari terlebih dahulu kegiatan belajar yang akan dilakukan.
4. Keberhasilan proses belajar Anda dalam mata diklat ini sangat bergantung kepada kesungguhan Anda dalam mengerjakan latihan. Untuk itu, berlatihlah secara mandiri atau berkelompok dengan teman sejawat.
5. Bila anda menemui kesulitan, silahkan hubungi instruktur/ widadswara pembimbing atau fasilitator yang mengajar modul ini.

Baiklah saudara pengguna modul, selamat belajar, semoga anda sukses memahami pengetahuan yang diuraikan dalam modul ini untuk bekal anda bertugas dengan baik.

B. Capaian Pembelajaran

Capaian pembelajaran yang akan anda dapatkan setelah mempelajari modul ini adalah : Menjelaskan kehidupan bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai orde lama.

C. Sub Capaian Pembelajaran

Setelah anda mempelajari modul ini, anda akan memiliki kemampuan untuk: Menjelaskan kehidupan politik pada masa awal kemerdekaan sampai masa orde lama

D. Materi

Sebelum membaca materi silahkan simak video berikut ini dahulu mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara

<https://bit.ly/2JuEwGv>

Kehidupan Politik Masa Orde Lama.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia disepakati bahwa konstitusi yang digunakan adalah UUD 1945 yang disahkan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, bentuk negara Indonesia adalah kesatuan dan sistem pemerintahannya presidensial yang bergeser ke parlementer. Kepala negara sekaligus menjabat sebagai kepala pemerintahan dan menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden, namun aturan tersebut tidak bertahan lama karena berdasarkan ketentuan pasal IV aturan peralihan UUD 1945 sebelum MPR, DPR dan dewan pertimbangan agung terbentuk presiden akan menjalankan kekuasaannya dengan bantuan komite nasional (KNIP). KNIP sendiri dijalankan oleh badan pekerja yang diketuai oleh Sultan Syahrir. KNIP yang semula berperan sebagai pembantu presiden berubah menjadi badan legislatif. Menteri kemudian tidak lagi bertanggung jawab kepada presiden tetapi bertanggung jawab kepada KNIP. Pada tanggal 14 November 1945 terbentuklah kabinet parlementer dengan perdana menteri Sutan Syahrir. Sistem kepartaian yang digunakan adalah sistem multi partai. Alat perlengkapannya adalah Presiden dan wakil, Menteri, MPR, DPR (yang kemudian dipegang oleh KNIP, dewan pertimbangan agung, Mahkamah Agung, dan badan pemeriksa keuangan). Pada periode ini juga terjadi beberapa perundingan dengan Belanda yang masih ingin menguasai Indonesia, beberapa perundingan itu antara lain :

- a. Perundingan Linggarjati

Perundingan Linggarjati merupakan adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Beberapa hasil perundingan tersebut antara lain : (1) Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera dan Madura, (2) Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949, (3) Pihak Belanda dan Indonesia Sepakat membentuk negara RIS, (4) Dalam bentuk RIS Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth/Persemakmuran Indonesia-Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala unit.



Gambar 1. Wilayah Indonesia hasil perundingan Linggarjati

Sumber : <https://bit.ly/2qPNQOn>

Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jendral H.J. van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini, dan pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah Agresi Militer Belanda I. Atas permintaan India dan Australia, pada 31 Juli 1947 masalah agresi militer yang dilancarkan Belanda dimasukkan ke dalam agenda Dewan Keamanan PBB, yang kemudian mengeluarkan Resolusi No. 27 tanggal 1 Agustus 1947, yang isinya menyerukan agar konflik bersenjata dihentikan. Dewan Keamanan PBB de facto mengakui eksistensi Republik Indonesia. Hal ini terbukti dalam semua resolusi PBB sejak tahun 1947, Dewan Keamanan PBB secara resmi menggunakan nama Indonesia, dan bukan Netherlands Indies. Sejak

resolusi pertama, yaitu resolusi No. 27 tanggal 1 Agustus 1947, kemudian resolusi No. 30 dan 31 tanggal 25 Agustus 1947, resolusi No. 36 tanggal 1 November 1947, serta resolusi No. 67 tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB selalu menyebutkan konflik antara Republik Indonesia dengan Belanda sebagai *The Indonesian Question*. Atas tekanan Dewan Keamanan PBB, pada tanggal 15 Agustus 1947 Pemerintah Belanda akhirnya menyatakan akan menerima resolusi Dewan Keamanan untuk menghentikan pertempuran.

Pada 17 Agustus 1947 Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda menerima Resolusi Dewan Keamanan untuk melakukan gencatan senjata, dan pada 25 Agustus 1947 Dewan Keamanan membentuk suatu komite yang akan menjadi penengah konflik antara Indonesia dan Belanda. Komite ini awalnya hanyalah sebagai *Committee of Good Offices for Indonesia* (Komite Jasa Baik Untuk Indonesia), dan lebih dikenal sebagai Komisi Tiga Negara (KTN), karena beranggotakan tiga negara, yaitu Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda dan Amerika Serikat sebagai pihak yang netral. Australia diwakili oleh Richard C. Kirby, Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland dan Amerika Serikat menunjuk Dr. Frank Graham.

b. Perjanjian Renville

Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang ditanda tangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabu di Tanjung Priok Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara (KTN), *Committee of Good Offices for Indonesia*, yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Perjanjian ini diadakan untuk menyelesaikan perselisihan atas Perjanjian Linggarjati tahun 1946. Perjanjian ini berisi batas antara wilayah Indonesia dengan Belanda yang disebut Garis Van Mook. Pihak yang hadir pada perundingan Renville antara lain : (1) Delegasi Indonesia di wakili oleh Amir syarifudin (ketua), Ali Sastroamijoyo, H. Agus Salim, Dr.J. Leimena, Dr. Coatik Len, dan Nasrun, (2) Delegasi Belanda di wakili oleh R.Abdul Kadir Wijoyoatmojo (ketua), Mr. H..A.L. Van Vredenburg, Dr.P.J. Koets,

dan Mr.Dr.Chr.Soumokil, (3) PBB sebagai mediator di wakili oleh Frank Graham (ketua), Paul Van Zeeland, dan Richard Kirby.

Isi perjanjian renville yang disepakati antara lain: (1) Belanda berdaulat atas Indonesia sebelum Indonesia mengubah menjadi RIS (Republik Indonesia Serikat), (2) Belanda hanya mengakui Jawa tengah, Yogyakarta, dan Sumatra sebagai bagian wilayah Republik Indonesia, (3) Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda, (4) TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur.



Gambar 2. wilayah Indonesia hasil perjanjian Renville

Sumber : <https://bit.ly/2F8T5gq>

Sebagai konsekuensi ditandatanganinya Perjanjian Renville, mengakibatkan berbagai dampak bagi bangsa Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut : (1) Wilayah RI semakin sempit dikarenakan diterimanya garis demarkasi Van Mook, wilayah Republik Indonesia meliputi Yogyakarta dan sebagian Jawa Timur, (2) Anggota TNI yang masih berada di daerah-daerah yang dikuasai Belanda, harus ditarik masuk ke wilayah RI. Di Jawa Barat ada sekitar 35.000 orang tentara Divisi Siliwangi pada tanggal 1 Februari 1948 dihijrahkan ke Wilayah RI, (3) Isi Perjanjian Renville mendapat tentangan sehingga muncul mosi tidak percaya terhadap Kabinet Amir Syarifuddin sehingga pada tanggal 23 Januari 1948, Amir menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden, (4) Perjanjian Renville menimbulkan permasalahan baru, yaitu pembentukan pemerintahan peralihan yang tidak sesuai dengan yang terdapat dalam perjanjian Linggarjati.

Setelah perjanjian Renville pihak Belanda rupanya belum menyerah juga, mereka masih ingin menguasai Indonesia seutuhnya, sehingga pada 19 Desember 1948 mereka melancarkan Agresi Militer Belanda II. Peristiwa tersebut diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatra yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara.

c. Konferensi Meja Bundar

Usaha untuk menggagalkan kemerdekaan Indonesia dengan jalan kekerasan berakhir dengan kegagalan. Dunia internasional mengutuk perbuatan Belanda tersebut. Belanda dan Indonesia lalu mengadakan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini secara diplomasi, lewat perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville. Pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan (PBB) Perserikatan Bangsa-Bangsa meloloskan resolusi yang mengecam serangan militer yang dilakukan Belanda terhadap tentara Republik di Indonesia dan menuntut dipulihkannya pemerintahan Republik Indonesia. Lalu diaturlah kelanjutan perundingan untuk menemukan solusi damai antara dua belah pihak. Pada tanggal 11 Agustus 1949, dibentuk perwakilan Republik Indonesia untuk menghadapi Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda.



Gambar 3. Suasana KMB

Sumber : <https://bit.ly/2vCX4Cr>

Pada Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan di Den Haag Pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949, Indonesia diwakili oleh: Drs. Hatta (ketua), Nir. Moh. Roem, Prof Dr. Mr. Supomo, Dr. J. Leitnena, Mr. Ali Sastroamijoyo, Ir. Djuanda, Dr. Sukiman, Mr. Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro Djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, Kolonel T.B. Simatupang, Mr. Muwardi. Perwakilan BFO ini dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Perwakilan Belanda dipimpin oleh Mr. van Maarseveen dan UNCI diwakili Chritchley.

Isi dari Konferensi Meja Bundar: (1) Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai sebuah negara yang merdeka, (2) Status Provinsi Irian Barat diselesaikan paling lama dalam waktu setahun, sesudah pengakuan kedaulatan, (3) Dibentuknya Uni Indonesia-Belanda untuk bekerja sama dengan status sukarela dan sederajat, (4) Republik Indonesia Serikat akan mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak-hak konsesi serta izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda, (5) Republik Indonesia Serikat harus membayar semua utang Belanda yang dari tahun 1942.

Hasil keputusan Konferensi Meja Bundar disampaikan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Selanjutnya, KNIP melakukan sidang dari tanggal 6-14 Desember 1949 untuk membahas hasil dari KMB. KNIP resmi menerima hasil KMB. Lalu pada tanggal 15 Desember 1949 diadakan pemilihan Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan calon tunggal Ir. Soekarno yang akhirnya terpilih sebagai presiden. Kemudian Ir. Soekarno dilantik dan diambil sumpahnya pada tanggal 17 Desember 1949. Setelahnya pada tanggal 23 Desember 1949 perwakilan RIS berangkat ke negeri Belanda untuk menandatangani akta penyerahan kedaulatan. Pada tanggal 27 Desember 1949, pada kedua negara, Indonesia dan negeri Belanda dilaksanakan upacara penandatanganan akta penyerahan kedaulatan Indonesia.

Periode berikutnya setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia adalah periode 1950-1959. Pada periode ini presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Periode ini berlangsung mulai dari 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959. Pada periode ini diberlakukan sistem Demokrasi

Parlementer yang sering disebut Demokrasi Liberal dan diberlakukannya UUDS 1950. Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri, dan Presiden hanya sebagai lambang. Sistem Demokrasi Liberal ternyata membawa akibat yang kurang menguntungkan bagi stabilitas politik. Berbagai konflik muncul ke permukaan. Misalnya konflik ideologis, konflik antar kelompok dan daerah, konflik kepentingan antar partai politik.

Adanya pergantian kabinet yang silih berganti mengakibatkan pembangunan tidak berjalan lancar, masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Kondisi perpolitikan di Indonesia sebelum dilaksanakan Pemilu tahun 1955 ada dua ciri yang menonjol, yaitu munculnya banyak partai politik (multipartai) dan sering terjadi pergantian kabinet/ pemerintahan. Pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada tujuh kabinet pada masa ini. Kabinet tersebut antara lain :

1) Kabinet Natsir



Gambar 4. Moh. Natsir

Sumber : <https://bit.ly/2qR1Nvv>

Kabinet Natsir adalah kabinet pertama pada masa demokrasi liberal. Kabinet ini terbentuk pada tanggal 6 September 1950 dan dilantik pada tanggal 7 September 1950. Perdana Menteri kabinet ini adalah Moh. Natsir dari Masyumi. Menteri kabinetnya berasal dari Masyumi ditambah tokoh-tokoh yang mempunyai keahlian istimewa, seperti Sri Sultan Hamengku Buana IX, Prof. Dr. Sumitro Joyohadikusumo, Assaat, dan Ir Juanda. Program kerja kabinet Natsir : (1) Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante, (2) Menyempurnakan susunan pemerintahan dan

membentuk kelengkapan negara, (3) Menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketentraman, (4) Meningkatkan kesejahteraan rakyat, (5) Menyempurnakan organisasi angkatan perang, (5) Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat. Akan tetapi, belum sampai program tersebut terlaksana, kabinet ini sudah jatuh pada 21 Maret 1951 dalam usia 6,5 bulan. Jatuhnya kabinet ini karena kebijakan Natsir dalam rangka pembentukan DPRD dinilai oleh golongan oposisi terlalu banyak menguntungkan Masyumi.

2) Kabinet Sukiman



Gambar 5. Sukiman

Sumber : <https://bit.ly/2F8tEM7>

Kabinet Sukiman merupakan kabinet koalisi. Partai-partai yang berkoalisi adalah kedua partai terbesar waktu itu, yaitu Masyumi dan PNI. Dr. Sukiman dari Masyumi terpilih menjadi perdana menteri dan Suwiryo dari PNI sebagai wakilnya. Kabinet Sukiman terbentuk pada tanggal 20 April 1951. Program kerja kabinet Sukiman : (1) Menjalankan berbagai tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara, (2) Membuat dan melakukan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakyat dan mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam pembangunan, (3) Menyelesaikan persiapan pemilu untuk membentuk Dewan Konstituante dan menyelenggarakan

pemilu itu dalam waktu singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah, (4) Menyiapkan undang-undang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh, (5) Menjalankan politik luar negeri bebas aktif, (6) Memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya. Kabinet Sukiman tidak mampu bertahan lama dan jatuh pada bulan Februari 1952. Penyebab jatuhnya kabinet ini adalah karena diserang oleh kelompok sendiri akibat kebijakan politik luar negeri yang dinilai terlalu condong ke Barat atau pro-Amerika Serikat. Pada saat itu, kabinet Sukiman telah menandatangani persetujuan bantuan ekonomi, teknologi, dan persenjataan dengan Amerika Serikat. Dan persetujuan ini ditafsirkan sebagai masuknya Indonesia ke Blok Barat sehingga bertentangan dengan program kabinet tentang politik luar negeri bebas aktif.

3) Kabinet Wilopo



Gambar 6. Wilopo

Sumber : <https://bit.ly/2vACC5k>

Kabinet yang ketiga ini berhasil dibentuk pada 30 Maret 1952. kabinet ini juga merupakan kabinet koalisi antara PNI dan Masyumi. Wilopo dari PNI terpilih sebagai perdana menteri. Program kerja kabinet Wilopo : (1) Mempersiapkan pemilihan umum, (2) Berusaha mengembalikan Irian Barat ke dalam pangkuan RI, (3) Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan, (4) Memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran, (5)

Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Kabinet Wilopo banyak mengalami kesulitan dalam mengatasi timbulnya gerakan-gerakan kedaerahan dan benih-benih perpecahan yang akan mengganggu stabilitas politik Indonesia. Ketika kabinet Wilopo berusaha menyelesaikan sengketa tanah perusahaan asing di Sumatera Utara, kebijakan itu ditentang oleh wakil-wakil partai oposisi di DPR sehingga menyebabkan kabinetnya jatuh pada 2 Juni 1953 dalam usia 14 bulan

4) Kabinet Ali Satroamijoyo (Kabinet Ali-Wongsonegoro)



Gambar 7. Ali Sastroamijoyo

Sumber : <https://bit.ly/2HjN8PS>

Kabinet keempat berhasil dibentuk pada tanggal 31 Juli 1953 yang dipimpin oleh Ali Satroamijoyo dari PNI dan wakilnya Wongsonegoro dari PIR (Partai Indonesia Raya). Program kerja Kabinet Ali-Wongsonegoro : (1) Menumpas pemberontakan DI/TII di berbagai daerah, (5) Melaksanakan pemilihan umum, (6) Memperjuangkan kembalinya Irian Barat kepada RI, (7) Menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Pada masa kabinet Ali-Wongsonegoro, gangguan keamanan makin meningkat, antara lain munculnya pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Daud Beureuh Aceh, dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Meskipun dihindangi berbagai kesulitan, kabinet Ali-Wongsonegoro berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Oleh karena itu, kabinet Ali-Wongsonegoro ikut terangkat namanya. Kabinet Ali-Wongsonegoro akhirnya jatuh pada bulan Juli 1955 dalam

usia 2 tahun (usia terpanjang). Penyebab jatuhnya kabinet Ali-Wongsonegoro adalah perselisihan pendapat antara TNI-AD dan pemerintah tentang tata cara pengangkatan Kepala Staf TNI-AD

5) Kabinet Burhanudin Harahap



Gambar 8. Burhanudin Harahap

Sumber : <https://bit.ly/2HV8kwo>

Kabinet kelima terbentuk pada tanggal 12 Agustus 1955 yang dipimpin oleh Burhanuddin Harahap dari Masyumi. Program kerja Kabinet Burhanuddin : (1) Mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, dalam hal ini kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat, (2) Akan dilaksanakan pemilihan umum, desentralisasi, memecahkan masalah inflasi, dan pemberantasan korupsi, (3) Perjuangan mengembalikan Irian Barat. Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, dilaksanakan pemilihan umum pertama di Indonesia. Kabinet ini menyerahkan mandatnya setelah DPR hasil pemilihan umum terbentuk pada bulan Maret 1956.

6) Kabinet Ali Satroamijoyo II

Kabinet keenam terbentuk pada tanggal 24 Maret 1956 di pimpin oleh Ali Satroamijoyo. Kabinet Ali II merupakan kabinet pertama hasil pemilihan umum. Program kerja Kabinet Ali II : (1) Menyelesaikan pembatalan hasil KMB, (2) Menyelesaikan masalah Irian Barat, (3) Pembentukan provinsi Irian Barat, (4) Menjalankan politik luar negeri

bebas aktif. Kabinet Ali II ini pun tidak berumur lebih dari satu tahun dan akhirnya digantikan oleh kabinet Juanda.

7) Kabinet Juanda



Gambar 9. Ir Juanda

Sumber : <https://bit.ly/2HIRHJj>

Kabinet Juanda disebut juga Kabinet Karya. Ir. Juanda diambil sumpahnya sebagai perdana menteri pada tanggal 9 April 1957. Program kerja Kabinet Karya disebut Pancakarya yang meliputi : (1) Membentuk Dewan Nasional, (2) Normalisasi keadaan RI, (3) Melanjutkan pembatalan KMB, (4) Memperjuangkan Irian Barat kembali ke RI, (5) Mempercepat pembangunan.

Setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem Demokrasi Liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa UUD 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal tidak cocok, karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Akhirnya Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara serta merintangi pembangunan semesta berencana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur; sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 mengumumkan dekrit Presiden yang isinya: (1) Pembubaran Konstituante, (2) Berlakunya Kembali UUD

1945, (3) Tidak berlakunya UUDS 1950, (4) Pembentukan MPRS dan DPRS.

Periode kepemimpinan Soekarno selanjutnya ada pada periode demokrasi terpimpin pada tahun 1959-1965. Langkah yang dilakukan oleh presiden Soekarno untuk membangun Indonesia pada tahun 1960-an adalah menggunakan konsep “revolusi belum selesai”. Konsep tersebut merupakan konsep yang digunakan Soekarno untuk menolak ideologi barat yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia setelah berdirinya suatu Negara (Indonesia). Pada masa Demokrasi Presidensial terdapat empat kekuatan partai yang mengisi parlemen yaitu NU, Masyumi, PNI dan PKI. Namun pada kenyataannya Soekarno lebih memilih partai Komunis Indonesia (PKI) dikarenakan politik poros Soekarno yang lebih cenderung ke negara Sosialis hal tersebut dibuktikan dengan poros Jakarta-Peking, Jakarta-Hanoi. Hal tersebut melanggar Undang- Undang Dasar Indonesia yang berpolitik secara bebas aktif. Pada masa Demokrasi Terpimpin, presiden Soekarno telah memberikan tempat bagi PKI dalam sistem perpolitikan nasional karena menurut Soekarno, PKI telah terbukti mempunyai basis masa terbesar di Indonesia daripada partai-partai lain, atas posisi tersebut Soekarno yang melaksanakan konsepsi NASAKOM (Nasional, Agama dan Komunis) sebagai landasan Demokrasi Terpimpin dan kolektivitas berbagai partai menjadi satu. Konsep revolusi yaitu revolusi nasional 17 Agustus 1945, revolusi sosial dan revolusi komunis menghasilkan jargon “Revolusi Belum Selesai” sangat relevan yang terus menguat, sehingga mempermudah Soekarno menjalankan sistem Demokrasi Terpimpin untuk meraih dominasi politik. Dalam konteks Demokrasi Terpimpin hubungan Soekarno selaku Presiden menjadi dekat dengan PKI.

Arah politik luar negeri Indonesia juga terjadi penyimpangan dari politik luar negeri bebas-aktif menjadi condong pada salah satu poros. Pada masa itu diberlakukan politik konfrontasi yang diarahkan pada negara-negara kapitalis, seperti negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Politik konfrontasi dilandasi oleh pandangan tentang Nefo (New Emerging Forces) dan Oldefo (Old Established Forces). Nefo merupakan kekuatan baru yang sedang muncul yaitu negara-negara progresif revolusioner (termasuk

Indonesia dan negara- Negara kornunis umumnya) yang anti imperialisme dan kolonialisme. Sedangkan Oldefo merupakan kekuatan lama yang telah mapan yakni negara-negara kapitalis yang neokolonialis dan imperialis (Nekolim).

Perwujudan poros anti imperialisme dan kolonialisme itu dibentuk poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Peking-Pyong Yang. Akibatnya ruang gerak diplomasi Indonesia di forum internasional menjadi sempit, karena berkiblat ke negara-negara komunis. Selain itu, pemerintah juga menjalankan politik konfrontasi dengan Malaysia. Hal ini disebabkan pemerintah tidak setuju dengan pembentukan negara federasi Malaysia yang dianggap proyek neo kolonialisme Inggris yang membahayakan Indonesia dan negara-negara blok Nefo. Para pemimpin PKI, Aidit, Njoto, dan lain-lain yang menuliskan statemen politik mereka dalam slogan-slogan Demokrasi Terpimpin dan menegaskan sikap mendukung Manipol juga harus mendukung Nasakom dan Resopim.

Pada masa ini juga Indonesia keluar dari keanggorannya sebagai anggota PBB. Penyebab utama Indonesia keluar dari PBB adalah diterimanya Malaysia sebagai anggota Dewan Keamanan (DK) tidak tetap PBB. Dengan masuknya Malaysia menjadi anggota DK tidak tetap PBB, maka Presiden Sukarno berpidato di depan Sidang Umum PBB dengan judul "Membangun Dunia Kembali". Karena PBB tetap menerima Malaysia menjadi anggota DK, maka pada tanggal 7 Januari 1965 dengan terpaksa Presiden Sukarno memutuskan Indonesia keluar dari PBB. Secara resmi keluarnya Indonesia dari PBB dinyatakan oleh Menlu Subandrio. Akibat keluarnya Indonesia dari PBB adalah Indonesia semakin terkucil dari pergaulan internasional. Ciri-ciri periode ini ialah dominasi yang sangat kuat dari presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Undang-Undang Dasar 1945 memberi kesempatan bagi seorang presiden untuk bertahan selama sekurang-kurangnya lima tahun. Akan tetapi Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 yang mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu lima tahun ini. Tahun 1960 Presiden Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum, padahal dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit

ditentukan bahwa presiden tidak mempunyai wewenang untuk berbuat demikian. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang menggantikan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum ditonjolkan peranannya sebagai pembantu Presiden, sedangkan fungsi kontrolnya ditiadakan. Bahkan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dijadikan menteri sehingga fungsi mereka lebih sebagai pembantu presiden dari pada wakil rakyat. Kuatnya posisi presiden juga merambah dalam bidang-bidang lain di luar bidang eksekutif. Berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 1964 Presiden diberi wewenang untuk campur tangan di bidang yudikatif. Dan masih Banyak lagi penyimpangan-penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Puncaknya pecahnya peristiwa G 30 S/PKI telah mengakhiri periode demokrasi terpimpin dan membuka jalan untuk di mulainya masa demokrasi Pancasila. Maka Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (SUPERSEMAR) yang ditujukan bagi Letjen Soeharto guna mengambil langkah yang dianggap perlu untuk mengatasi keadaan Negara yang semakin kacau dan sulit dikendalikan. Pada tanggal 12 Maret 1967 Jenderal Soeharto dilantik menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS Jenderal Abdul Haris Nasution.